



LAPORAN KINERJA **KECAMATAN BANGSALSARI** **KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Bangsalsari. Kinerja Kecamatan Bangsalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021.

Januari 2021

KEPALA KECAMATAN BANGSALSARI



Drs. SUPRIYONO, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 196404051987031015

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV. PENUTUP.	26
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bangsalsari

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Bangsalsari tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik yang mendapat predikat nilai **Baik**, Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran dengan capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan

masyarakat dan kesejahteraan sosial dan meningkatnya Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu yang mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian indikator tergolong **Baik** pada tahun 2021.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Bangsalsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, indikator capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 39,74 % merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 1.536.290.700,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar 60,26 % atau sebesar Rp 2.329.987.812,-

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.486.537.153 atau 38,45 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai
2. Sumber daya manusia masih kurang memadai

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana khususnya ruang pelayanan melalui program Rehabilitasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya Kabupaten Jember
2. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia melalui pembinaan petugas pelayanan.
3. Menyediakan tempat khusus untuk penanganan pengaduan dan saran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Bangsalsari

Kinerja Kecamatan Bangsalsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Bangsalsari dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Bangsalsari adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Bangsalsari
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Bangsalsari dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bangsalsari dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BANGSALSARI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Bangsalsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Bangsalsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum
- 2) Kecamatan Bangsalsari dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan diwilayah kerja kecamatan.
- 3) Kecamatan Bangsalsari mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / kelurahan
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Bangsalsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi
 - b. Penanganan konflik social
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
 - f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
 - g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa

- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- l. Pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Bangsalsari terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Bangsalsari merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 Yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan.

Dengan Sasaran : 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/desa

Dengan Sasaran : 1. Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Bangsalsari menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah : Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah: pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan public

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah : optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintahan dan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah : membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Bangsalsari pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/desa

Indikator Sasaran :

- Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

Indikator Program Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP

- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
- Indikator Program Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketertaman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social, pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Bangsalsari yang ditindaklanjuti

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bangsalsari selama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan) terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Koordinasi Pelayanan Umum)
Indikator Kegiatan (output/keluaran) :Jumlah pelayanan masyarakat yang dilayani
- b. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :
1. Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial)
Indikator Keluaran Kegiatan :
 - Jumlah kegiatan kader posyandu selama 12 bulan
 - Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan selama 12 bulan

2. Kegiatan : Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum)

Indikator Keluaran Kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan kegiatan HUT RI dan penanganan dampak covid 19
- Jumlah pelaksanaan kegiatan trantibum

3. Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan)

Indikator Keluaran Kegiatan :

- Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan orang 820 RT RW untuk setiap kegiatan

4. Kegiatan : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan)

Indikator Keluaran Kegiatan :

- Jumlah 11 desa yang sudah menyusun APBDES 2021 dan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan
- Jumlah usulan dalam musrenbang desa

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja

menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	B
	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1.Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial 2.Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Bangsalsari;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM

<p>Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun</p>	<p>Semua bidang Seksi : • Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos • Ketertiban dan Keamanan</p>	<p>Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi</p>
	<p>Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat $\frac{Waktu}{Jumlah\ Desa} \times 100\%$</p>	<p>Kasi Pemerintahan</p>	<p>Laporan Desa</p>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Bangsalsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

SASARAN NO. STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI CAPAIAN 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	90	90
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan Bangsalsari	3 Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. Tujuan 1 Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	89,50	66,40	83%	81,40	93,71

Sumber Data: .Data Pengumpulan LKIP pada ESR dan SIPPD

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	100%	93,71%	Baik

Sumber Data: Data Pengumpulan LKIP pada ESR dan SIPPD

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

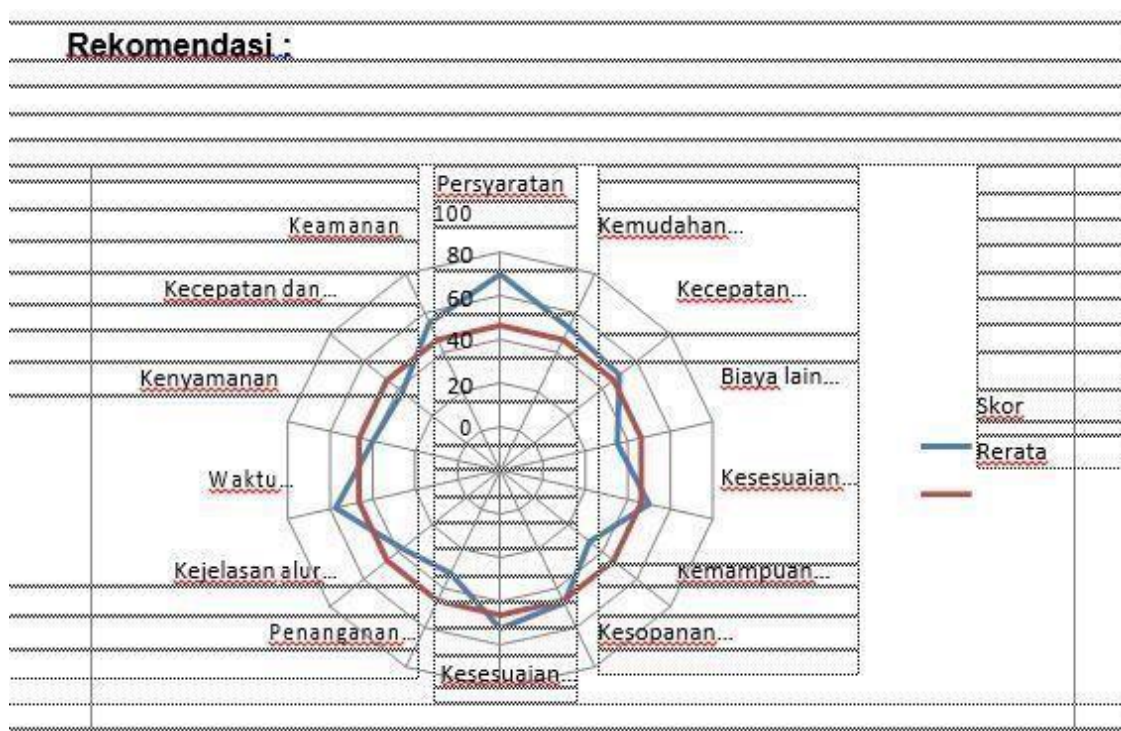
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	-	-	-

*Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Penjelasan hasil survai adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan					
2	Kemudahan Prosedur					
3	Kecepatan Pelayanan	10%	0%	90%	0%	100%
4	Biaya lain (pungutan)	30%	80%	20%	20%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	0%	10%	90%	0%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	0	90%	10%	0%	100%
7	Kesopanan petugas	10%	10%	80%	0%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	0%	10%	90%	0%	100%
9	Penanganan pengaduan dan Saran	0%	90%	10%	0%	100%
10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	40%	0%	50%	10%	100%
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	0%	0%	90%	10%	100%
12	Kenyamanan	0%	60%	40%	0%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	10%	20%	70%	0%	100%
14	Keamanan	0%	0%	0%	100%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	90	Sangat baik
2	Kemudahan Prosedur	72,5	Sangat baik
3	Kecepatan Pelayanan	70	baik
4	Biaya lain (pungutan)	55	Kurang baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	70	baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	52,5	Kurang baik
7	Kesopanan petugas	67,5	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	72,5	baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	52,5	Kurang baik
10	Kejelasan alur pembagian petugas Pelayanan	57,5	Kurang baik
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	77,5	baik
12	Kenyamanan	60	Kurang baik
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	57,5	Kurang baik
14	Keamanan	75	baik
Rata-rata unsur pelayanan		66,4	Baik



Berdasar grafik di atas warna biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Nilai di bawah rerata adalah aspek yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan lebih dari Pemerintah Kabupaten, aspek tersebut adalah : kecepatan pelayanan, biaya lain, kemampuan petugas, kejelasan alur dan penanganan pengaduan dan saran.

Dari diagram di atas garis biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Aspek di bawah rerata adalah aspek yang prioritas untuk ditingkatkan, yakni : kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan dan saran, kenyamanan dan kemudahan prosedur.

Untuk meningkatkan nilai beberapa aspek yang dibawah rerata pada tahun 2021 diadakan :

1. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia melalui pembinaan petugas pelayanan Kecamatan dan Desa.
2. Pemasangan banner persyaratan pelayanan baik di Kecamatan maupun di Desa.
3. Menyediakan tempat khusus untuk penanganan pengaduan dan saran.
4. Peningkatan serta pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas
5. Pelayanan Adminduk langsung di Kecamatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (Satu) program dan 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Anggaran	9.290.000	8.945.600	96,29 %
Keluaran/Output	:	Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses	KK = 1.000 KTP = 2.500 A.K = 750 S.P = 1000 Lain 2 = 6.000	KK = 987 KTP = 2.300 A.K = 615 S.P = 822 Lain2 = 5.048	
Penjelasan	:	Pelaksanaan Kegiatan : Administrasi kependudukan yang dilaksanakan antara lain Perekaman KTP, Pembuatan KK, Akta Kelahiran, Surat Pindah, Ijin HO, Ijin Galian C dan Lain-lain			

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Bangsalsari	Persentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	95,79	96,63	100	100	99,02

Sumber Data: PPTK Kec. Bangsalsari

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Bangsalsari	Persentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	99,02	100

Sumber Data: PPTK Kecamatan Bangsalsari dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Bangsalsari

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan Bangsalsari	Persentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentaraan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	99,02	-	-

Sumber Data: data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 99.02%, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil**.

Pada indikator sasaran ini tingkat pencapaian 99,02% (sangat baik) dikarenakan semua rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan dan seksi PMKS dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk tetap bisa mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2021 diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan rekomendasi hasil koordinasi semua seksi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 2 (Dua) program dan 2 (Dua) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Dana	856.784.000	848.688.200	99,06
Keluaran/Output	:	Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan orang 820 RT RW	4 kegiatan	4 kegiatan	
Penjelasan	:	Peserta kegiatan berasal dari RT RW se Kec. Bangsalsari			

2. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan)

a. Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan)

b. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Dana	8.815.000	18.294.850	97,24
Keluaran/Output	:	1. Jumlah Jumlah desa yang sudah menyusun APBDES 2021 dan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan 2. jumlah usulan dalam musrenbang desa	- 11 Desa - 20 Usulan	- 11 Desa - 20 Usulan	
Penjelasan	:	Peserta kegiatan berasal dari Perangkat Desa se Kec. Bangsalsari			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Bangsalsari tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.866.278.512 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi		Rp. 3.810.949.512
Belanja Pegawai	Rp. 2.329.987.812	
Belanja Barang/jasa	Rp. 1.480.961.700	
b. Belanja Modal		Rp. 55.329.000
- Belanja Modal....	Rp. 55.329.000	
- Belanja Modal...	Rp. 0	
Jumlah		Rp. 3.866.278.512

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 98,57 % dan Belanja Modal sebesar 1,43 %

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Kecamatan Bangsalsari tahun 2021 terdiri dari:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.712.665.412	2.211.874.288	81,54
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.426.987.812	1.945.838.236	80,18
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.987.812	1.945.838.236	80,18
	b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.212.600	86.169.450	92,44
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.212.600	86.169.450	92,44
	c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.465.000	179.866.602	93,45
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.465.000	179.866.602	93,45
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	866.074.000	857.633.800	99,03
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	856.784.000	848.688.200	99,06
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	856.784.000	848.688.200	99,06
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	9.290.000	8.945.600	96,29

		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
		- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.290.000	8.945.600	96,29
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.815.000	18.294.850	97,24
	a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.815.000	18.294.850	97,24
		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.815.000	18.294.850	97,24
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	268.724.100	260.797.100	97,05
	a.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	268.724.100	260.797.100	97,05
		- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	268.724.100	260.797.100	97,05
JUMLAH			3.866.278.512	3.348.600.038	86,61

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja operasi sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran Starategis I : Meningkatkan kualitas pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan) dengan anggaran Rp. 9.290.000,-
Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 9.290.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 0,60 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Bangsalsari.
- b. Untuk Sasasaran Strategis II : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan
Didukung oleh :
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan) dengan Anggaran Rp. 856.784.000,-
 - Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan) dengan anggaran Rp 18.815.000Keseluruhan anggaran 2 (Dua) Program dan 3 (Tiga) Kegiatan sejumlah Rp. 875.599.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 56,99 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Bangsalsari.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Bangsalsari telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Bangsalsari tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Bangsalsari dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 (Dua) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 (Dua) indikator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.348.600.038 (86,61%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.850.332.236 (47,86%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.486.537.153 (38,45 %),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bangsalsari masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2021 tidak ada masalah/ hambatan yang cukup berarti namun demikian untuk pos belanja Tidak Langsung masih menyisakan anggaran karena adanya ASN yang Pensiun.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Perintah Pimpinan OPD / Camat Bangsalsari untuk meningkatkankinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
2. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukurserta tepat waktu.
3. Penyusunan Program / Kegiatan sesuai dengan Schedule sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANGSALSARI

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara n Pemerintahan khususnya pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	B	A	A	A	A	A	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Kelurahan/ desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	75	80	85	90	95	100	Optimisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos
				Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	75	80	85	90	95	100			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN BANGSALSARI

JL. Achmad Yani NO. 48 ☎ (0331) 711418 JEMBER 68154

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUPRIYONO, SH, MM**

Jabatan : **CAMAT BANGSALSARI**

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Jabatan : **BUPATI JEMBER**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 November 2021
Pihak Pertama
CAMAT BANGSALSARI,


Drs. SUPRIYONO, SH, MM
NIP. 19640405 198703 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN BANGSALSARI

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	B
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial 2. Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.712.665.412	DPPA TA. 2021
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 866.074.000	DPPA TA. 2021
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 18.815.000	DPPA TA. 2021
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 268.724.100	DPPA TA. 2021
Jumlah	Rp. 3.866.278.512	DPPA TA. 2021

Jember, 01 November 2021


BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU


CAMAT BANGSALSARI,
DR. SUPRIYONO, SH, MM
 NIP. 19640405 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI

JL. ACHMAD YANI NO. 48 ☎ (0331) 711418 JEMBER 68154

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dalam pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan)	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Koordinasi Pelayanan Umum)	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	12 Bulan	61.960.500
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan)	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan)	- Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan orang 848 RT RW	4 Kegiatan	1.017.600.000



**KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/19/35.09.09/2021

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 9 Maret 2021

CAMAT BANGSALSARI



Drs. SUPRIYONO, S.H.,M.M

Pembina

NIP. 19640405 198703 1 015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Instansi	: Kecamatan Bangsalsari
Tugas	: Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakatb. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumc. Melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangand. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umume. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatanf. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Desa
Tujuan	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik
Indikator Tujuan	: Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : • Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos • Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat $\frac{Waktu}{Jumlah Desa} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Laporan Desa



CAMAT BANGSALSARI

Drs. SUPRIYONO, S.H.,M.M

Pembina

NIP. 19640405 198703 1 015